



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS.**

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki pedoman atau panduan kinerja sebagai acuan perencanaan pembangunan, baik jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan, jangka menengah lima tahunan maupun perencanaan jangka pendek satu tahun sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 dilakukan melalui pendekatan politik oleh Kepala Daerah terpilih langsung yang dideskripsikan dalam visi, misi, dan program sehingga menjadi program prioritas pembangunan jangka menengah daerah per lima tahunan.

Reviu RPJM Kabupaten Bireuen menjadi pedoman target yang ingin dicapai Kepala Daerah dan perangkatnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama masa kepemimpinannya.

#### **1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan

permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di kabupaten Bireuen pada tahun 2016 berpedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, yang merupakan pedoman operasional -

pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

#### **a. VISI**

Langkah awal dalam strategi formulation sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (Future) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Atas dasar pengertian sebagai mana tersebut di atas, maka untuk tahun 2012 -2017 visi pemerintah Kabupaten Bireuen adalah:

**“Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri Berlandaskan UUPA”**

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi pemerintah Kabupaten Bireuen adalah:

1. Bermartabat dimaksudkan masyarakat Kabupaten Bireuen yang beradab, beretika dalam segala segi kehidupan, memiliki harga diri, saling hormat-



menghormati, kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat, cinta damai, bersatu, taat hukum, dan menolak segala bentuk kemungkaran, bermartabat juga mengandung unsur maju, integritas, dan sejahtera, yang masing-masing bermakna sebagai berikut :

➤ Maju dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil, memiliki wawasan luas kreatif dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong percepatan pembangunan, berikutnya, mencerminkan pula menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas. Maju tersebut dapat dijabarkan menurut aspek-aspek berikut ini :

- Maju dalam bidang ekonomi.

Dimaksudkan bahwa masyarakat Bireuen memiliki kemampuan ekonomi yang mapan, terutama mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, serta memiliki lapangan usaha dan lapangan kerja yang produktif. Selain itu, kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pula dari menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.

- Maju dalam bidang pendidikan.

Kemajuan dalam bidang pendidikan terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang handal, menguasai ilmu dan teknologi, mampu berinovasi dan menciptakan peluang-peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berperan aktif dalam proses pembangunan daerah.



- Maju dalam bidang kesehatan.  
Artinya, masyarakat Bireuen memiliki kualitas derajat kesehatan yang tinggi, baik jasmani maupun rohani, yang ditandai oleh menurunnya angka kematian, menurunnya angka gizi buruk, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dan meningkatnya angka harapan hidup.
  
- Maju dalam bidang sosial budaya.  
Dimaksudkan bahwa masyarakat Bireuen memiliki rasa kepedulian yang tinggi, persatuan dan kesatuan yang kokoh, terciptanya keamanan dan ketertiban umum, dan tegaknya hukum secara adil.  
Dimaksudkan bahwa masyarakat Bireuen memiliki rasa kepedulian yang tinggi, persatuan dan kesatuan yang kokoh, terciptanya keamanan dan ketertiban umum, dan tegaknya hukum secara adil.
  
- Maju dalam bidang politik dan hukum.  
Artinya, masyarakat Bireuen yang sadar dan taat hukum, memiliki kemampuan politik yang mengarah kepada pembaharuan dan perubahan positif dan dinamis tanpa mengenyampingkan persatuan dan kesatuan bangsa serta keberlanjutan perdamaian.
  
- Integritas dimaksudkan, masyarakat Kabupaten Bireuen yang menjadi masyarakat yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas dan terampil memiliki wawasan luas, kreatif dan tekun dan rajin, produktif mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan, makmur dalam kehidupan dan tingginya pertumbuhan ekonomi daerah.
  
- Sejahtera dimaksudkan, masyarakat Kabupaten yang sehat baik jasmani maupun rohani, hidup layak, mencapai kemakmuran maupun memenuhi kebutuhan dasar dengan sebaik-baiknya, bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan, bebas dari ketakutan, ancaman dan



tindak kekerasan, tertib dan aman, baik dalam keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

2. Mandiri yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Bireuen mampu mengembangkan potensi diri guna memenuhi kebutuhan hidup. Mandiri diartikan pula bahwa Kabupaten Bireuen harus sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan potensi sumber daya dan kekuatan sendiri.
3. Berlandaskan UUPA dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga terwujudnya masyarakat Bireuen yang bermartabat, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### **b. MISI**

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan pemerintah kabupaten Bireuen untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.



Sejalan dengan hal tersebut, maka misi Pemerintah Daerah kabupaten Bireuen, dalam periode 2012-2017 diarahkan untuk mewujudkan Bireuen yang lebih maju, Sejahtera dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan Visi kabupaten kabupaten Bireuen akan dijabarkan dalam misi pembangunan Bireuen tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan Berwibawa (good and clean governance).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
3. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
4. Mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan empat tujuan (4) tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Daerah dalam jangka waktu sampai tahun 2017, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi serta yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu.



Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bireuen, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kabupaten Bireuen.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur pada tahun 2016 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sejalan dengan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017, dengan uraian sebagai berikut:

➤ Tujuan Pertama.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih dan berwibawa

Sasarannya yaitu :

- 1 Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas
- 2 Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal
- 4 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif, Integratif dan partisipasif,
- 5 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.



- Tujuan Kedua  
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan

Sasarannya:

- 1 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas,
- 2 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

- Tujuan Ketiga  
Menumbuh kembangkan dan menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal,

Sasarannya:

- 1 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 14,85 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.
- 2 Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah.
- 3 Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan.
- 4 Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal.
- 5 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
- 6 Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu.

- Tujuan Keempat  
Menguatkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA.

Sasarannya adalah:

- 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian.





- 2 Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian.
- 3 Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.
- 4 Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJM KABUPATEN BIREUEN 2012-2017**

### **1. Arah Kebijakan dan Strategi.**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bireuen mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2012 – 2017) disajikan sebagai berikut :

**VISI :**

**KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN MANDIRI  
BERLANDASKAN UUPA.**

**MISI PERTAMA :**

**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA, BERSIH DAN  
BERWIBAWA**

**Arah Kebijakan :**

1. Mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat serta aparat pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.
3. Meningkatkan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung percepatan penerapan nilai-nilai Dinul Islam.
4. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung penerapan *e-government*.
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparat secara bertahap dan berkesinambungan dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara partisipatif yang didukung keakuratan data dan informasi.
7. Meningkatkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah guna terciptanya kemandirian daerah.
8. Memperkuat kapasitas DPRK dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.
9. Meningkatkan kualitas aparat desa dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa.



**Tujuan :**

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih dan Berwibawa

**Sasaran :**

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif dan partisipatif
5. Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

**Strategi :**

1. Peningkatan kapasitas transparansi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi pembangunan yang didukung dengan pengembangan dan penerapan e-government.
2. Penguatan nilai-nilai islami dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang islami dan berwibawa
3. Peningkatan kapasitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan pengembangan penerapan e-government.
4. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
5. - Penguatan kapasitas DPRK dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kinerja pemerintah daerah



- Penguatan kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif, integratif dan partisipatif yang didukung sistem informasi teknologi dan data informasi statistik yang akurat dan tepat waktu
- Peningkatan kualitas manajemen pelayanan yang efektif dan profesional sesuai standar pelayanan minimal serta penguatan SDM aparatur yang berintegritas
- Peningkatan pengawasan internal secara terpadu dan mendorong penerapan pengendalian internal yang efektif
- Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya terciptanya kemandirian daerah
- Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai dinul islam
- Peningkatan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung percepatan penerapan nilai-nilai dinul islam.

**MISI 2 :**

**MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS**

**Tujuan :**

Meningkanya Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

**Strategi 1 :**

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pengembangan zona pendidikan Kota Santri di wilayah barat (Samalanga dan

- sekitarnya) dan Kota pelajar di wilayah Timur (Matangglumpang Dua dan sekitarnya).
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau, baik formal maupun informal.
  3. Penguatan kapasitas dan kemandirian kelembagaan dayah dalam rangka optimalisasi peran dayah dalam pembangunan daerah.
  4. Peningkatan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan dan wilayah.
  5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan.

**Strategi 2 :**

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang modern dan berkualitas di semua strata pelayanan.
2. Peningkatan kompetensi sumberdaya kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.
3. Perluasan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas yang didukung pemerataan sumberdaya kesehatan serta peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat secara bertahap.
4. Peningkatan kualitas manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi kesehatan.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku yang sehat dan mendukung pola hidup bersih.

**Arah Kebijakan 1 :**

1. Menetapkan zona pendidikan Kota Santri di wilayah barat (Samalanga dan sekitarnya) dan Kota pelajar di wilayah Timur (Matangglumpang Dua dan sekitarnya) melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Memperluas akses pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik formal maupun informal.



3. Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas di semua jenjang pendidikan dan wilayah.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan
5. Menguatkan kapasitas dan kemandirian lembaga dayah dalam rangka meningkatkan peran dayah dalam pembangunan daerah.

**Arah Kebijakan 2 :**

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang modern dan berkualitas.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Memperluas dan menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Membangun kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang bersih dan sehat.

**MISI 3 :**

**MEMBERDAYAKAN EKONOMI BERDAYA SAING SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

**Tujuan :**

Menumbuhkembangkan dan menguatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal

**Sasaran :**

1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 14,85 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.
2. Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah.
3. Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan.
4. Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal.



5. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
6. Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu.

**Strategi :**

1. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
2. Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis potensi dan karakteristik wilayah, terutama sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen.
3. Percepatan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan.
4. Pengembangan pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai Islami dan budaya lokal.
5. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
6. Peningkatan promosi potensi komoditi andalan dan unggulan Kabupaten Bireuen secara berkesinambungan.
7. Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, meliputi, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut..
8. Pengembangan ekonomi perdesaan yang berbasis santri/ ekonomi pasantren.

**Arah Kebijakan :**

1. Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan, terutama sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM dalam rangka perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen'



3. Membangun iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
4. Mengembangkan industri pengolahan secara terpadu berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan.
5. Mengembangkan dan membenahi daya tarik wisata yang memperhatikan nilai-nilai Islami dan budaya local.
6. Meningkatkan promosi potensi komoditi andalan dan unggulan Kabupaten Bireuen.
7. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang didukung pengembangan program minapolitan, meliputi sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang didukung pengembangan program minapolitan, meliputi sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, normalisasi kuala, dan pengembangan budidaya perikanan darat dan laut.
8. Mengembangkan ekonomi berbasis pesantren.

#### **MISI 4**

**MEMBERDAYAKAN MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UUPA**

#### **Tujuan :**

Menguatkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA

#### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian.
2. Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian
3. Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.
4. Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.



**Strategi :**

1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian.
2. Peningkatan kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA.
3. Penguatan interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adat istiadat.
4. Penguatan peran kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan signifikan dalam pembangunan daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian.
2. Menjalin kerjasama yang sinergis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keutuhan perdamaian berdasarkan UUPA.
3. Memupuk dan memperkuat interaksi sosial kemasyarakatan sesuai budaya dan adat istiadat.
4. Menguatkan peran kelembagaan adat dalam mendorong keberlanjutan perdamaian dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

**2. Rencana Kinerja.**

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 yang dijabarkan dari Reviu RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun ke empat dalam pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017. Mencermati arah dan kebijakan pada RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 maka pada tahun 2016, prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian

tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Tabel di bawah berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja, untuk setiap sasaran pada tahun 2016, setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

**Tabel 2.1  
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya implimentasi tata kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas.	1 Laporan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
		2 Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	B
		3 Nilai EKPPD	Nilai	Tinggi
2	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Jumlah Penerimaan PAD	Rp	199.866.989.814,38
		2 Jumlah Belanja Pemerintah	Rp	2.075.895.536.269,72
		3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,24
		4 Komposisi Belanja Langsung	%	34,60
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat	Indek	85
		2 Rata-rata lama proses perizinan	Hari	3
		3 Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	90,00
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif	1 Tingkat Keselarasan RKPK dengan RPJM	%	85,00
		2 Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100,00
		3 Jumlah Qanun RDTR Kawasan Perkotaan	Qanun	1



5	Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat	1	Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	kasus	100,00
		2	Jumlah Penerimaan zakat	Rp	3.000.000,-
		3	Muzakarah Ulama	Kali	1
6	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,39
		2	Angka Melek Huruf (persen)	%	99,06
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100,00
			a. SD/Sederajat	%	98,00
			b. SMP/Sederajat	%	95,00
			c. SMA/Sederajat		
		4	Angka Kelulusan	%	100,00
	a. SD/MI	%	100,00		
	b. SMP/MTS	%	100,00		
	c. SMA/SMK/MA	%	100,00		
	5	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	a. SD/Sederajat	%	97,00		
	b. SMP/Sederajat	%	92,00		
	c. SMA/Sederajat	%	80,00		
	6	Rasio Guru Murid			
	a. SD/MI	Rasio	1 : 30		
	b. SMP/MTs	Rasio	1 : 27		
	c. SMA/MA	Rasio	1 : 30		
7	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	1	Angka prevalensi gizi buruk pada anak	%	0,20
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,38
		3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Orang	50
		4	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	16
		5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	97,50
		6	Cakupan Pelayanan imunisasi	%	87,00
		7	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00
		8	Rasio posyandu per 10,000 balita	%	17,72



8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 14,85 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017	1	Angka Kemiskinan Penduduk	%	15,55
		2	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	3,55
		3	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71
9	Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah	1	Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,50
		2	Ketersediaan pangan utama	%	12,35
		3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	106
		4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK) Tanaman Pangan dan Holtikultural Peternakan Perkebunan Perikanan	% % %	- - 3,75
10	Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan	1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32,079
		2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	5,00
		3	Luas Areal Budi Daya	Ha	515
		4	Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	42,30
11	Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal	1	Kontribusi sektor sub perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	%	32,50
		2	Jumlah UMKM	Unit	6400
		3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHK)	%	2,00
		4	Jumlah Koperasi yang aktif	Unit	189
12	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	1	Kualitas dan jaringan infrastruktur a. Jalan Kabupaten b. Jembatan	Meter %	64,070 85,00
		2	Luas jaringan irigasi dalam dalam kondisi baik	%	48,94
		3	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1 : 0,249
		4	Pembangunan rumah layak huni	Unit	195



13	Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu	1 Cakupan penanganan sampah	%	75,00
		2 Tingkat Pemantauan lingkungan	%	30,00
		3 Tingkat penanganan bencana	%	60,00
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian	1 Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian	Kasus	150
15	Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian	1 Persentase pertemuan /rapat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda)	%	100,00
16	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan	1 Persentase penyelesaian tindak pidana	%	30,00
17	Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah	1 Partisipasi lembaga adat dalam pembangunan daerah	%	100,00

Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) Kabupaten 2012-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2012-2017 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bireuen yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012-2017 sesuai periode RPJM Kabupaten telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Bireuen Nomor 135 Tahun 2016.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TINGKAT KABUPATEN  
TAHUN 2012-2017.**

**Tabel 2.2**  
Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas.	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPK/unit kerja yang terkait dengan administrasi, SDM, dan sarana dan prasarana. 2 Opini WTP atas laporan keuangan 3 Pengesahan APBK Bireuen tepat waktu 4 Persentase Rancangan Qanun diusulkan Eksekutif dengan qanun yang disahkan 5 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur 6 Hasil audit dan pengawasan yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBK terus meningkat 2 Komposisi belanja langsung yang terus meningkat dalam struktur APBK 3 Penyampaian Laporan pertanggungjawaban APBK tepat waktu
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal.	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat 2 Pengurusan perizinan yang cepat, tepat, dan transparan 3 Pelayanan administrasi kependudukan yang baik
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipatif	1 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kabupaten dan kecamatan yang partisipatif dan tepat waktu 2 Konsistensi penjabaran program RKPK mengacu pada RPJM

		3 Pengesahan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen pada tahun 2013
		4 Pengesahan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen pada tahun 2014 dan kawasan perkotaan kecamatan sampai dengan tahun 2017
		5 Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat waktu
5	Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat	1 Berkurangnya kasus pelanggaran Syariat Islam
		2 Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi positif terhadap penerapan Dinul Islam
6	Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas	1 Terlaksananya penetapan zona pendidikan Kota Santri di wilayah barat (Samalanga dan sekitarnya) dan Kota Pelajar di wilayah Timur (Matangglumpang Dua dan sekitarnya) pada tahun 2013
		2 Meningkatnya angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka kelulusan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah
		3 Menurunnya angka putus sekolah di tingkat SMP/ sederajat dan SMA sederajat
		4 Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
		5 Meningkatnya pemerataan sarana belajar dan mengajar di seluruh sekolah
		6 Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		7 Meningkatnya prestasi dan daya saing siswa dalam setiap perlombaan di bidang pendidikan dan kebudayaan
		8 Meningkatnya pendidikan karakter disetiap jenjang pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter islami



		9 Terlaksananya revitalisasi kelembagaan pendidikan dayah dan peningkatan mutu serta daya saing santri lulusan dayah
7	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Meningkatnya angka harapan hidup, serta menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi 2 Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas dan rumah sakit 3 Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas dan rumah sakit 4 Menurunnya angka prevalensi gizi buruk
8	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 14,85 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017	1 Persentase penduduk miskin
9	Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah	1 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan 2 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan 3 Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang mendukung ketahanan pangan daerah 4 Terlaksananya program agropolitan
10	Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan	1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2 Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya 3 Terlaksananya program minapolitan dalam mendukung peningkatan pendapatan nelayan secara berkesinambungan
11	Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal	1 Tertatanya pusat pasar 2 Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang terus meningkat signifikan dalam struktur ekonomi daerah



		3 Meningkatnya unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong percepatan ekonomi daerah
12	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	<p>1 Meningkatnya kualitas dan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>2 Meningkatnya kualitas dan jaringan jalan menuju sentra-sentra produksi</p> <p>3 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat yang menghubungkan pusat perkotaan (ibukota) dengan pusat kecamatan</p> <p>4 Meningkatnya kualitas dan jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan</p> <p>5 Meningkatnya akses layanan komunikasi dan informatika</p> <p>6 Meningkatnya RT yang terlayani air bersih</p> <p>7 Meningkatnya RT yang terlayani listrik</p> <p>8 Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat miskin/kaum dhuafa.</p>
13	Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu	<p>1 Meningkatnya kualitas lingkungan</p> <p>2 Berkurangnya daerah yang rawan bencana.</p>
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian	1 mengganggu keamanan dan keberlanjutan perdamaian
15	Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian	1 Terlaksananya Rakorpimda
16	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan	1 Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin
17	Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.	1 Persentase kegiatan kelembagaan adat mendukung pembangunan

### 3. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam review RPJM Kabupaten Bireuen, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1	2	3
1	Meningkatnya Implimentasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Islami, Bersih, Dan Berwibawa Yang Didukung Terobosan Kinerja Secara Terpadu, Akuntabel Dan Integritas.	16
2	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipatif	11
5	Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat	13
6	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas	16
7	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	13
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 9,45 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017	1
9	Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah	14
10	Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan	10
11	Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal	8



12	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	17
13	Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu	8
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian	3
15	Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian	2
16	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan	2
17	Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah	1

#### **4. PERJANJIAN KINERJA 2016**

Perjanjian kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

- d. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bireuen tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dan perubahannya Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya implimentasi tata kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas.	1	Laporan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
		2	Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	B
		3	Nilai EKPPD	Nilai	Tinggi
2	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1	Jumlah Penerimaan PAD	Rp	199.866.989.814,38
		2	Jumlah Belanja Pemerintah	Rp	2.075.895.536.269,72
		3	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,24
		4	Komposisi Belanja Langsung	%	34,60



3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah yang terus meningkat	Indek	85
		2	Rata-rata lama proses perizinan	Hari	3
		3	Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	90,00
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipatif	1	Tingkat Keselarasan RKPK dengan RPJM	Qanun	1
		2	Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100,00
		3	Jumlah Qanun RDTR Kawasan Perkotaan	Qanun	1
5	Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat	1	Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	kasus	100
		2	Jumlah Penerimaan zakat	Rpr	3.000.000,-
		3	Muzakarah Ulama	Kali	1
6	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,39
		2	Angka Melek Huruf	%	99,06
		3	SD/Sederajat	%	100,00
			SMP/Sederajat	%	98,00
			SMA/Sederajat	%	95,00
4	Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA	% % %	100,00 100,00 100,00		
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)		



			SD/Sederajat	%	97,00
			SMP/Sederajat	%	82,00
			SMA/Sederajat	%	80,00
		6	Rasio Guru Murid SD/MI	Rasio	1 : 30
			SMP/MTs	Rasio	1 : 27
			SMA/MA	Rasio	1 : 30
7	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	1	Angka prevalensi gizi buruk pada anak	%	0,20
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,38
		3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Orang	50
		4	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	16
		5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	97,5
		6	Cakupan Pelayanan imunisasi	%	87,00
		7	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00
		8	Rasio posyandu per 10,000 balita	%	17,72
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 14,85 % dari jumlah Penduduk pada akhir tahun 2017	1	Angka Kemiskinan Penduduk	%	15,55
		2	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	3,55
		3	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71
9	Terlaksananya	1	Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,50



	revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah	2	Ketersediaan pangan utama	%	12,35
		3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	106
		4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK) Tanaman Pangan dan Peternakan Perkebunan Perikanan	%	-
				%	-
%	3,75				
<hr/>					
10	Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan	1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32.079
		2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	5,00
		3	Luas Areal Budi Daya	Ha	515
		4	Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	42,30
<hr/>					
11	Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal	1	Kontribusi sektor sub perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	%	32,50
		2	Jumlah UMKM	Unit	6400
		3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHK)	%	2,00
		4	Jumlah Koperasi yang aktif	Unit	189
<hr/>					
12	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	1	Kualitas dan jaringan infrastruktur : Jalan Kabupaten dan Jembatan	Meter	64,070
				%	85,00
		2	Luas jaringan irigasi dalam dalam kondisi baik	%	48,94
		3	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1 : 0,249



		4	Pembangunan rumah layak huni	Unit	195
13	Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu	1	Cakupan penanganan sampah	%	75,00
2		Tingkat Pemantauan lingkungan	%	30,00	
2		Tingkat penanganan bencana	%	60,00	
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian	1	Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian	%	150,00
15	Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian	1	Persentase pertemuan /rapat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda)	%	100,00
16	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan	1	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	30,00
17	Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah	1	Partisipasi lembaga adat dalam pembangunan daerah	%	100,00



